



## Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan : Konsep, Implementasi, dan Tantangan

Imelda Saputri<sup>1</sup>, Ersi Sisdianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Indonesia

Korespondensi Penulis : [imeldasaputri130@gmail.com](mailto:imeldasaputri130@gmail.com)

**Abstract** *Social and Environmental Responsibility Accounting (APSL) is increasingly important in the business world along with increasing attention to sustainability issues. This approach involves reporting that not only covers financial aspects, but also the social and environmental impacts caused by company activities. APSL's main goal is to increase transparency, accountability, and encourage responsible business practices towards society and the environment. APSL implementation involves identifying significant social and environmental issues, measuring impacts, and reporting that complies with international standards. Even though regulations related to social and environmental responsibility already exist, challenges in implementing APSL remain, including lack of understanding, high implementation costs, and regulatory inconsistencies between countries. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) mechanisms that involve all stakeholders is expected to support the success of APSL and increase the credibility of social and environmental reporting. The company's success in implementing APSL shows that this strategy is not only beneficial for reputation, but also contributes to long-term economic sustainability.*

**Keywords:** *Implementation, Accounting, Social, Environmental, Challenges*

**Abstrak** Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan (APSL) semakin penting dalam dunia bisnis seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. Pendekatan ini melibatkan pelaporan yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Tujuan utama APSL adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Implementasi APSL melibatkan identifikasi isu sosial dan lingkungan yang signifikan, pengukuran dampak, serta pelaporan yang mematuhi standar internasional. Meskipun regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah ada, tantangan dalam penerapan APSL tetap ada, termasuk kurangnya pemahaman, biaya implementasi tinggi, serta ketidakkonsistenan regulasi antar negara. Penerapan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) yang melibatkan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung keberhasilan APSL dan meningkatkan kredibilitas pelaporan sosial dan lingkungan. Keberhasilan perusahaan dalam menerapkan APSL menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya bermanfaat untuk reputasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

**Kata Kunci :** Implementasi, Akuntansi, Sosial, Lingkungan, Tantangan

### 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu keberlanjutan, akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (Social and Environmental Accountability Accounting) semakin menjadi elemen penting dalam dunia bisnis dan tata kelola organisasi. Akuntansi ini tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan.

Dalam implementasinya, akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan mencakup pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan dampak aktivitas organisasi terhadap

masyarakat dan lingkungan. Pelaporan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan sumber daya alam dan emisi karbon, tetapi juga mencakup aspek lain seperti kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak asasi manusia, hingga dampak sosial lainnya. Dengan demikian, akuntansi ini menjadi instrumen strategis bagi perusahaan untuk membangun reputasi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Namun, implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya standar pelaporan yang seragam, kesulitan dalam mengukur dampak non-finansial, serta resistensi dari beberapa perusahaan yang masih memprioritaskan keuntungan ekonomi dibanding tanggung jawab sosial. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya akuntansi ini juga perlu terus ditingkatkan, khususnya di wilayah-wilayah yang belum memiliki regulasi ketat terkait pelaporan sosial dan lingkungan.

Pentingnya akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan juga didasari oleh kebutuhan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan secara lebih holistik. Selama ini, laporan keuangan perusahaan cenderung hanya berfokus pada kepentingan investor dan kreditor, sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Standar Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1. Namun, kenyataannya, banyak pihak lain seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar, dan kelompok kepentingan lainnya yang membutuhkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Dalam praktiknya, perusahaan sering mengabaikan eksternalitas negatif dari operasional mereka, seperti pencemaran lingkungan, polusi udara, atau dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Isu-isu seperti ini sering menjadi perhatian publik, sebagaimana diberitakan media massa, seperti kasus eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan atau masalah keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi harus berperan lebih aktif dalam menangani persoalan sosial dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingannya.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

### **Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (Social and Environmental Accounting) merupakan pendekatan akuntansi yang bertujuan untuk mencatat, mengukur, dan

melaporkan dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas organisasi. Konsep ini menegaskan peran penting organisasi dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai keberlanjutan bisnis. Menurut Gray et al. (1996), akuntansi sosial dan lingkungan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada kontribusi non-keuangan seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini memperluas paradigma tradisional akuntansi yang sebelumnya berorientasi pada laba menjadi akuntansi yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip utama dalam akuntansi ini meliputi transparansi, yaitu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya; akuntabilitas, yang berarti mempertanggungjawabkan dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan; serta keberlanjutan, yakni berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

### **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah revolusi industri perkembangan perusahaan semakin cepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan sumber daya manusia dan alam juga semakin besar. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, perusahaan mengambil berbagai tindakan, antara lain menggunakan teknologi modern dalam berproduksi, melakukan akuisisi, penggunaan sumber daya yang lebih murah, pengurangan biaya, dan usaha lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Semuanya dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih banyak kepada pemegang saham.

Tindakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, di satu sisi akan meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi di sisi lain mungkin akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan, berupa pencemaran air, penggundulan hutan, pencemaran udara, dan lainnya. Perusahaan menganggap semua yang dilakukannya sebagai eksternalitas dari usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Berdasarkan pembahasan teori sebelumnya, keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak. Investor berkepentingan terhadap sumber daya yang diinvestasikan di perusahaan. Kreditor berkepentingan terhadap pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Pemerintah berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu (Satyo, 2005). Namun, yang tak kalah pentingnya adalah pihak-pihak yang selama ini kurang

mendapat perhatian, yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat di sekitar perusahaan. Karyawan perlu mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial yang layak. Bila memungkinkan, karyawan memerlukan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian sehingga dapat meningkatkan karier di perusahaan. Pemasok berkepentingan terhadap pelunasan utang dagang. Pelanggan berkepentingan terhadap kualitas produk perusahaan. Terakhir, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan berkepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang berasal dari aktivitas perusahaan.

Perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Selama ini perusahaan cenderung untuk mementingkan kepentingan investor, sedangkan kepentingan pihak lain, seperti karyawan dan masyarakat diabaikan, dianggap sebagai eksternalitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan persaingan nilai upah ditekan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan tidak ada jaminan kelanggengan bekerja bagi buruh harian lepas (Kompas, 2 Juli 2010). Pengurangan upah buruh dan ketiadaan jaminan kerja akan menguntungkan pihak pemilik perusahaan. Masalah kualitas produk, masalah lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan berupa perusakan lingkungan dari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Eksploitasi batu bara yang kurang memperhatikan daya dukung kawasan terus mengancam kelestarian lingkungan (Kompas, 25 Juni 2010).

Berdasarkan contoh dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan, maka tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada investor, yaitu memberikan pengembalian yang maksimal kepada investor. Kepentingan publik dan lingkungan juga perlu mendapat perhatian perusahaan sebagai dukungan atas operasi perusahaan. Pelestarian lingkungan di samping bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi perusahaan khususnya perusahaan yang memanfaatkan lingkungan dan mendapatkan keuntungan dari lingkungannya. Misalnya, perusahaan di bidang perhotelan. Hotel perlu memelihara lingkungan untuk memberikan perasaan nyaman kepada wisatawan yang menginap.

### **Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Implementasi akuntansi sosial dan lingkungan dilakukan melalui pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR report*), dengan panduan utama yang sering digunakan adalah standar internasional seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*. Proses implementasi ini mencakup beberapa langkah utama, dimulai dengan identifikasi dampak sosial dan lingkungan, yaitu menentukan aspek-aspek yang relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Langkah berikutnya adalah

pengukuran kinerja, yang melibatkan pengumpulan data terkait indikator-indikator seperti emisi gas rumah kaca, limbah, dan pelaksanaan program sosial. Terakhir, perusahaan menyusun laporan yang mencakup data keuangan dan non-keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan tersebut. Praktik ini sering kali menjadi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor ekstraktif seperti pertambangan, energi, dan agrikultur, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pemerintah atau persyaratan pasar modal.

### **Tantangan dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Meskipun penting, implementasi akuntansi sosial dan lingkungan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang mengikat, karena di banyak negara pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela, sehingga tidak semua perusahaan merasa wajib untuk melaksanakannya. Selain itu, biaya implementasi yang tinggi menjadi kendala signifikan, mengingat pengumpulan data, pelaporan, dan proses audit membutuhkan sumber daya finansial dan tenaga kerja yang besar. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran, di mana tidak semua manajer atau pemangku kepentingan memahami pentingnya akuntansi sosial dan lingkungan. Kesulitan dalam pengukuran dampak non-keuangan juga menjadi hambatan, karena pengukuran ini sering kali memerlukan metode yang rumit dan standar yang berbeda-beda. Tekanan dari investor tradisional yang lebih fokus pada laba jangka pendek turut memperparah tantangan ini, sebab hal tersebut sering kali bertentangan dengan kebutuhan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam keberlanjutan.

### **Teori yang Mendukung Laporan Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Salah satu tujuan pelaporan keuangan dalam SFAC No. 1 adalah untuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, selama ini memang belum ada pengaturan yang mewajibkan pelaporannya di Indonesia dan beberapa negara Asia, kecuali di Eropa (Basyit, 2005). Akan tetapi, beberapa teori mendukung insentif perusahaan untuk melaporkannya kepada publik. Beberapa teori yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah legitimacy theory dan stakeholder theory (Deegan, 2004: 292).

#### *Legitimacy Theory*

*Legitimacy theory* menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan

mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan.

Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan legitimasi perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar kegiatan operasional perusahaan. Kegagalan untuk memenuhi harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemudian akan berdampak terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan.

Pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk mengkomunikasikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

#### *Stakeholder Theory*

*Stakeholder theory* mempertimbangkan berbagai kelompok (stakeholders) yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana harapan kelompok stakeholder memiliki dampak yang lebih besar (lebih kecil) terhadap strategi perusahaan. Teori ini berimplikasi terhadap kebijakan manajemen dalam mengelola harapan stakeholder. Stakeholder perusahaan pada dasarnya memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai bagaimana perusahaan dioperasikan. Perusahaan akan berusaha untuk mencapai harapan stakeholder yang berkuasa dengan menyampaikan pengungkapan, termasuk pelaporan aktivitas sosial dan lingkungan.

#### **Akuntansi Sosial dan Lingkungan**

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, akuntansi sosial dan lingkungan menjadi perhatian perusahaan karena perusahaan berusaha memenuhi harapan pihak-pihak terkait dalam upaya mendapatkan legitimasi. Stakeholder teori menjelaskan bahwa perusahaan akan memenuhi harapan stakeholder perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk menyampaikan laporan yang menyajikan informasi mengenai upaya perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan yang dikenal selama ini berbentuk corporate social responsibility (CSR) dan sustainability reporting (SR). Selain itu, akuntansi sosial dan lingkungan juga dapat diterapkan dalam bidang akuntansi manajemen dan auditing.

#### **Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah *corporate social responsibility (CSR)* dan *sustainability reporting (SR)*. Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada annual report atau sebagai laporan terpisah dari annual report. Akuntansi CSR dan SR menjadi perhatian perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Akuntansi CSR didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran, dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan (Angraini, 2006: 5). SR merupakan isu baru yang kemudian berkembang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk memproteksi lingkungan (Gaffikin, 2008 : 206). SR tidak sekadar melaporkan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, pembuangan limbah, dampak sosial atas operasi perusahaan, tetapi mencakup pula bagaimana program dan kinerja perusahaan atas pengembangan masyarakat (*community development*) terutama di daerah operasi perusahaan (Laily, 2005).

Menurut Gaffikin (2008 : 201), ide pertanggungjawaban sosial perusahaan bisnis sudah ada pada zaman Yunani Klasik. Perusahaan bisnis diharapkan untuk menerapkan standar yang tinggi mengenai moralitas dalam perdagangan. Pada zaman pertengahan di Eropa, Gereja mewajibkan industri dan perusahaan bisnis berperilaku sesuai dengan kode moral Gereja. Isu ini kemudian menjadi hangat di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada tahun 2000 perhatian serupa diberikan oleh Global Reporting Initiative (GRI), sebagai bagian dari program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan pedoman SR yang meliputi tiga elemen, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang selanjutnya direvisi pada tahun 2002 (Satyo, 2005).

#### Akuntansi Manajemen Lingkungan

Akuntansi lingkungan tidak terbatas akuntansi keuangan, tetapi juga diterapkan pada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen lingkungan digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan. Sesuai dengan pembahasan teori sebelumnya, stakeholder theory, Arfan (2008:

112) mengidentifikasi manfaat manajemen lingkungan bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

### Audit Sosial

Salah satu bagian dari akuntansi sosial adalah audit sosial. Tujuan audit sosial adalah untuk menilai kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (Deegan, 2004:322). Hasil audit sosial digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan dan sebagai dasar untuk kegiatan dialog dengan masyarakat.

### **3. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi perihal konsep, implementasi, dan tantangan yang ada dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel terkait lainnya. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan diterapkan dalam praktik organisasi serta tantangan yang muncul. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Subjek penelitian adalah organisasi atau perusahaan yang telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Objek penelitian meliputi dokumen laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, kebijakan internal, serta wawasan dari para praktisi terkait.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut.

“...Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting)”.



PSAK No. 1 belum mengatur dengan tegas, tetapi mengatur pengungkapan dampak lingkungan. Perlakuan akuntansi dampak lingkungan juga diatur di dalam PSAK No. 32 mengenai Akuntansi Kehutanan dan PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK No. 32 dan 33 semestinya sudah memadai untuk mengatur perlakuan akuntansi lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal misalnya menyatakan sebagai berikut.

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 74. Pasal ini menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dengan pelaksanaannya yang memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban ini, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula SAK telah menuangkannya dalam bentuk petunjuk perlakuan akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aplikasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang selama ini dipublikasikan antara lain Anggraini (2006) dan Ja'far dan Arifah (2006). Penelitian Anggraini (2006) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan masyarakat. Evaluasi dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang terdaftar di BEI sebagian besar telah mengungkapkan kinerja ekonomi berupa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dalam bentuk pemberian uang

pesangon, pensiun, dan bonus. Pengungkapan ini dilakukan karena adanya tekanan dari pemerintah dan profesi akuntan, berupa surat keputusan No. Kep150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan, serta PSAK No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagian besar perusahaan perbankan dan asuransi (lebih dari 50%) mengungkapkan informasi mengenai praktik kerja, yaitu informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, perusahaan juga sudah mengungkapkan kegiatan-kegiatan sosial, berupa pemberian sumbangan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk memenangi persaingan yang semakin ketat. Namun, masih sedikit perusahaan yang melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Penelitian lain yang dilakukan dalam konteks akuntansi lingkungan dilakukan oleh Ja'far S. dan Arifah (2006). Ja'far S. dan Arifah (2006) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan jawaban kuesioner, mereka menemukan adanya tindakan proaktif pihak manajemen untuk melakukan manajemen lingkungan dan rata-rata kinerja lingkungan mereka cukup tinggi. Sementara itu manajer mempersepsikan bahwa dorongan manajemen lingkungan yang dilakukan pihak eksternal berada pada level sedang. Dari 53 perusahaan sampel, 20 perusahaan menerbitkan environmental disclosure dalam annual report.

Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa perusahaan telah mengungkapkan aktivitas sosial mereka karena dorongan persaingan yang semakin ketat dan adanya peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Namun, pengungkapan aktivitas lingkungan masih jarang dilakukan. Suharto (2004) mengemukakan beberapa kesulitan yang dihadapi manajemen keuangan dalam melaporkan kewajiban lingkungan, antara lain sebagai berikut: pertama, permintaan atas pengungkapan informasi lingkungan dalam pelaporan keuangan belum ada secara tegas; kedua, perusahaan merasakan ketidakseimbangan antara biaya dan manfaat dalam menyajikan informasi lingkungan dalam laporan keuangan; ketiga, adanya pengenalan kewajiban bersyarat; dan keempat, kesulitan dalam mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan.

Satyo (2005) memberikan tiga kendala pelaporan SR, yaitu (1) rendahnya political will dari manajemen tingkat atas, (2) tidak adanya standar pelaporan SR, dan (3) tidak adanya pengukuran kinerja SR. Gray (2008) menyatakan bahwa akuntansi sosial belum terorganisasi dalam area koheren atau aktivitas. Penerapan akuntansi sosial dan lingkungan belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Khususnya akuntansi lingkungan, berdasarkan hasil penelitian perusahaan publik di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang

melaporkannya dalam annual report sehingga perlu dicari jalan keluarnya untuk meningkatkan penerapannya.

### **Penyusunan Standar Akuntansi Lingkungan**

Dalam upaya untuk memiliki pedoman SR, IAI diharapkan menyusun pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat mandatory mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Aras dan Crowther (2008) menyatakan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur sustainability dan memberikan petunjuk model yang lengkap mengenai impikasi distribusi dan dikembangkan menjadi model yang dapat dioperasionalkan. Kebutuhan standar pelaporan juga terkait dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Usaha ini mungkin akan menemukan kendala terkait dengan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunannya karena standar akuntansi sosial dan lingkungan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan nonkeuangan.

### **Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan (APSL) merupakan pendekatan pelaporan yang mengintegrasikan aspek keuangan dan non-keuangan perusahaan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Selain itu, APSL juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, yakni tanggung jawab perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Konsep ini juga mendorong praktik bisnis yang berfokus pada aspek jangka panjang, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan di masa depan.

### **Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan (APSL) melibatkan beberapa langkah utama yang saling terkait. Langkah pertama adalah identifikasi aspek materialitas, di mana perusahaan perlu mengidentifikasi isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dan signifikan, seperti emisi karbon, limbah industri, dan kesejahteraan karyawan. Setelah itu, pengukuran dan pelaporan dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan

kualitatif untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan, yang kemudian disajikan dalam laporan keberlanjutan atau laporan terpadu.

Perusahaan juga harus memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, seperti *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan ISO 26000, untuk menyelaraskan praktik mereka dengan pedoman global. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan sangat penting, termasuk melibatkan masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan multinasional seperti Unilever telah berhasil menerapkan APSL dengan mengurangi emisi karbon, mengelola limbah, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa APSL tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

### **Mengembangkan Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) untuk Memastikan Penerapan Kewajiban Sosial dan Lingkungan**

Untuk memastikan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperlukan mekanisme GCG. Mekanisme GCG yang selama ini hanya melindungi investor khususnya, di pasar modal. Mekanisme GCG dapat diperluas, yaitu untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan misalnya pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Dalam aplikasinya peran komisaris independen dapat diperluas yang sebelumnya hanya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas diperluas untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mempublikasi laporan akuntansi sosial dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media massa, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin kredibilitas laporan akuntansi sosial dan lingkungan, laporan perlu diaudit oleh akuntan

### **Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan**

Tantangan dalam penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan (APSL) mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran, terutama di kalangan UMKM, mengenai pentingnya APSL, yang mengakibatkan pelaporan yang masih minim. Selain itu, biaya implementasi yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi perusahaan, terutama yang lebih kecil, dalam mengadopsi sistem pelaporan keberlanjutan. Proses pengumpulan data yang relevan dan akurat juga menjadi tantangan karena memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Ketidakkonsistenan regulasi antar negara atau wilayah juga turut menghambat tercapainya standar pelaporan yang seragam. Terakhir, perusahaan sering menghadapi tekanan

dari pemangku kepentingan yang memiliki tuntutan berbeda, seperti pemegang saham, konsumen, dan regulator, yang dapat memengaruhi prioritas dalam penerapan APSL.

## 5. KESIMPULAN

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan (APSL) berperan penting dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan. Meskipun telah diatur dalam regulasi, implementasi APSL masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman perusahaan, biaya tinggi, dan kesulitan dalam pengukuran data. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan APSL lebih serius dengan dukungan dari pemerintah, regulator, dan masyarakat, serta penguatan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan efektivitasnya.

Akuntansi sosial dan lingkungan menjadi penting karena perusahaan harus mempertanggungjawabkan dampak operasionalnya. Akuntansi tradisional yang hanya memberikan informasi keuangan tidak cukup untuk mendukung keberlanjutan. Di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan telah menerapkan APSL, penerapannya masih terbatas. Solusinya adalah dengan menciptakan standar pelaporan yang baku, seperti sustainability reporting (SR), yang mengacu pada pedoman Global Reporting Initiative (GRI), memberikan penghargaan bagi perusahaan yang melaksanakan SR dengan baik, dan melakukan audit lingkungan untuk meningkatkan kredibilitas laporan. Pengembangan mekanisme GCG juga sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Z. (2019). *Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Andayani, M., & Widyastuti, R. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan dalam menunjang tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 22-35.
- Angraini, A. (2006). Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (Studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Paper presented at Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Aras, G., & Crowther, D. (2008). Evaluating sustainability: A need for standards. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 2(1), 19-35.
- Budi, T. (2018). Akuntansi sosial dan lingkungan sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 10(2), 45-58.

- Daryanto, E. (2021). *Akuntansi sosial dalam bisnis berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Deegan, C. (2004). *Financial accounting theory*. Australia: McGraw-Hill.
- Dewi, I. P. (2021). Implementasi corporate social responsibility di sektor industri manufaktur. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 19(1), 75-85.
- Gaffikin, M. (2008). *Accounting theory research, regulation, and accounting practice*. N.S.W.: Pearson Education.
- Gray, R. (2008). Social and environmental accounting and reporting: From ridicule to revolution? From hope to hubris? – A personal review of the field. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 2(1), 3-18.
- Hartati, D., & Pramudia, F. (2019). Peran akuntansi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 23(4), 65-80.
- Hidayat, S. (2022). Tantangan akuntansi lingkungan dalam praktik CSR perusahaan di Indonesia. *Jurnal Studi Akuntansi dan Manajemen*, 21(2), 90-102.
- Istiqomah, N. (2020). Evaluasi program CSR dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Indonesia*, 25(1), 110-121.
- Ja'far, S., Muhammad, & Arifah, D. A. (2006). Pengaruh dorongan manajemen lingkungan, manajemen lingkungan proaktif, dan kinerja lingkungan terhadap public environmental reporting. Paper presented at Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Junaedi, B. (2019). Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan: Perspektif praktik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 16(3), 130-140.
- Kasmir, M. (2020). *Manajemen keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, R. (2021). Penerapan akuntansi lingkungan dalam sektor perusahaan besar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 20(4), 58-70.
- Pohan, S. (2018). *Akuntansi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rudianto, H. (2020). *Akuntansi CSR: Konsep dan implementasi dalam bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Salim, M., & Kurniawati, L. (2018). Akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan: Studi kasus perusahaan di Jakarta. *Jurnal Akuntansi Global*, 18(2), 99-112.
- Sari, T. M. (2021). *Pengantar akuntansi lingkungan dan sosial*. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Satyo. (2005). Perlu political will yang kuat. *Akuntansi*, 47, 10-11.
- Suharto, H. (2004). Standar akuntansi lingkungan: Kebutuhan mendesak. *Akuntansi*, 42, 4-5.

- Suryanto, R. (2019). *Akuntansi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Utami, E. (2022). *Akuntansi dan keberlanjutan: Perspektif lingkungan dan sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wibowo, S. (2020). *Akuntansi untuk bisnis berkelanjutan: Teori dan praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wulansari, P. (2022). Dampak akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan terhadap reputasi perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Indonesia*, 19(3), 85-97.
- Yuliana, M. (2021). *Tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan*. Surabaya: Universitas Kristen Petra Press.